

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Narasumber UI
TEMA : Konflik Internal Partai Warnai 2008
Tensi Politik Semakin Naik
SURAT KABAR/MAJALAH : Media Indonesia

Hari Rabu Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 2 Kol 2-5

RINGKASAN

Ketegangan politik di internal pemerintah dan partai besar turut mewarnai perjalanan bangsa selama 2008. Berbagai prediksi yang diluncurkan oleh para pengamat politik akademisi diberbagai universitas memprediksikan ketegangan yang akan muncul pada pemilu 2009 khususnya pada internal partai politik, akan didominasi dengan naiknya tensi politik 2008. Pengamat politik UI, Arbi sanit menawarkan solusi agar partai-partai perlu menegaskan sikap dengan membentuk koalisi yang kuat untuk membenahi sistem kepartaian dan meredam gejolak.

CATATAN:

51



■ ANTARA/SALIS AKBAR

ZIKIR NASIONAL: Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (tengah) berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) dan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat mengikuti Zikir Nasional di Masjid At-Tin, Jakarta, Senin (31/12) malam. Zikir Nasional menjelang pergantian tahun itu bertema *Zikirku untuk lingkunganku*.

Konflik Internal Partai Warnai 2008

Tensi Politik semakin Naik

JAKARTA (Media): Ketegangan politik di internal pemerintah dan partai besar turut mewarnai perjalanan bangsa selama 2008.

Demikian prediksi sejumlah pengamat politik, kemarin. Ary Dwipayana dari UGM mengatakan ketegangan dalam pemerintahan muncul manakala hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla semakin tidak harmonis terkait dengan persiapan mereka menghadapi Pemilu dan Pilpres 2009.

Sedangkan di lingkungan internal partai politik, kata dia, pada 2008 juga akan terjadi ketegangan terutama di tingkat kader, karena mereka akan saling sikut untuk menentukan daftar urut maupun kader mana yang akan duduk dalam jajaran legislatif.

Untuk partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), friksi akan muncul pada penentuan tokoh calon wakil presiden yang akan mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden.

Partai Golkar juga tidak luput

dari ketegangan tersebut, terutama saat menentukan cara menjaring capres, yaitu melalui konvensi atau bukan. Akibat dari kondisi itu, kata Ary Dwipayana, perhatian pemerintah kepada masyarakat pada 2008 akan menurun karena akan lebih berkontribusi pada persiapan Pemilu dan Pilpres 2009.

Namun, bagi pengamat politik Universitas Paramadina Anies Baswedan, semakin dekatnya Pemilu 2009 bukan menjadi penyebab naiknya tensi politik pada 2008. "Stabilitas politik akan sangat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerja pemerintah," katanya.

Menurut dia, naiknya tensi politik pada 2008 tidak bisa dilihat dalam setting yang kosong. "Yang menentukan marak atau tidaknya manuver politik dari partai yang punya menteri dalam kabinet saat ini adalah kemungkinan terpilih-

nya kembali SBY pada 2009," katanya.

Koalisi kuat

Apabila kinerja pemerintahan yang dipimpin SBY menurun dan diperkuat persepsi publik, lanjut Anies, manuver politik yang berlawanan dengannya akan menguat. "Partai-partai yang saat ini tergabung dalam aliansi pendukung pemerintah akan mencoba menjaga jarak yang seimbang dengan kandidat lain," ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Sebaliknya, kata dia, bila posisi SBY menguat karena kinerjanya dinilai bagus, partai-partai pendukung tidak akan melakukan manuver politik.

Sementara itu, pengamat politik Centre Strategic for Indonesia Studies (CSIS) Indra J Piliang menilai manuver politik dari partai-partai, termasuk tokoh-tokohnya yang ada dalam kabinet, tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. "Masyarakat sudah mengerti dan tidak akan terpengaruh manuver politik. Energi konflik di bidang politik sudah mulai mencair," ujarnya.

Yang bisa menjadi masalah, lanjut Indra, terjadinya gejolak sosial apabila kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. "Orang-orang di pemerintahan bisa berkelahi sendiri. Pemerintah akan kian rapuh menjadi pemerintah yang tidak lagi memerintah," tuturnya.

Karena itulah, pengamat politik dari UI Arbi Sanit menawarkan solusi agar partai-partai perlu menegaskan sikap membentuk koalisi yang kuat untuk membenahi sistem kepartaian dan meredakan gejolak tersebut. "UU Parpol yang sudah disahkan tidak bisa membenahi sistem kepartaian kita yang rumit," katanya.

Partai-partai, lanjut Arbi, bisa menyederhanakan kerumitan itu dengan bersepakat membangun koalisi yang kuat. "Koalisi itu bisa dibangun di luar aturan UU. Jangan hanya dua atau tiga partai saja yang berkoalisi, harus lebih banyak, sehingga nanti tinggal dua kubu partai. Yang satu pendukung, yang lainnya oposisi."

(HR/Ant/P-1)

13